



Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Yevi Andriani¹⁾*, Sri Suwitri²⁾, Tri Yuniningsih³⁾

¹²³Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Gd. Pascasarjana A Undip, Jl. Imam Bardjo Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 Indonesia.

*Korespondensi Penulis. E-mail: yeviandriani03@gmail.com, Telp : +6285384205720

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam metodenya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek dukungan, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan dukungan penuh terhadap SIKS-NG, meskipun masih terdapat kendala tertentu. Di sisi lain, dalam hal kapasitas, sumber daya finansial dan infrastruktur teknologi masih belum memadai, dan kekurangan tenaga ahli di bidang IT menjadi hambatan. Namun, manfaat dari SIKS-NG sudah terasa, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengelola data bantuan sosial, walaupun masih ada masyarakat miskin yang belum terdata. Dari tiga indikator diatas disimpulkan bahwa Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan belum efektif.

Kata Kunci : *E-goverment*, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), DTKS

The Implementation of E-Government through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a Poverty Data Processing Application in Bengkulu Selatan Regency

Abstract

This study aims to assess the implementation of e-government through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) for processing poverty data in South Bengkulu Regency. Researchers used a descriptive, qualitative approach. Data collection involved observation, interviews, and documentation. The analysis, using Support, Capacity, and Value criteria, reveals positive aspects in Support, including support, human resources allocation, and socialization by the Social Service Office of South Bengkulu District. However, issues persist in these areas. Capacity falls short in financial and technological resources, and IT expertise. Value shows benefits in accessing social assistance information. Still, many impoverished individuals remain unregistered, indicating room for improvement. From the three indicators above, it can be concluded that the implementation of E-Government through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) as a poverty data processing application in South Bengkulu Regency has not been effective.

Keywords: *E-goverment*, Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG), DTKS





PENDAHULUAN

Perkembangan yang sangat pesat pada sistem informasi dan teknologi informasi saat ini sudah dianggap menjadi sumber daya yang sangat penting untuk organisasi pemerintah atau swasta (Hammer dan Champy, 1993). Sistem informasi dan teknologi informasi, bukan sekedar memiliki peran sebagai sebuah dukungan saja, tetapi sudah menjadi operasional utama, berpotensi tinggi, berperan strategis serta bisa dimanfaatkan sebagai pendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas di suatu organisasi (Wheelan dan Hunger, 2004).

Perkembangan teknologi informasi sudah membawa perubahan bagi dunia yang menjadi mudah dengan didukung oleh teknologi komputer, terbukti bahwa efektivitas dapat tercapai pada mekanisme kerja yang panjang dan berulang, komputer berperan penting sebagai penunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di dalam sebuah instansi. Selama ini pengaturan data melalui penggunaan Sistem Basis Data (*Database System*) sudah memberikan dukungan bagi kinerja banyak instansi. Informasi adalah hal yang sangat penting untuk sebuah organisasi dalam mengambil suatu keputusan, informasi bisa didapat dari sistem informasi (*Information System*).

Secara umum, *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi digital guna mentransformasikan aktivitas pemerintah, dengan tujuan peningkatan

efektivitas, efisiensi serta pemberian layanan (Forman, 2005). Istilah *E-government* atau *electronic government* mengacu kepada pemakaian teknologi informasi pada organisasi pemerintah supaya organisasinya dapat lebih efektif dan transparan. Adanya *e-government* diharapkan dapat membuat pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, semakin meningkatkan efektivitas internal organisasi pemerintahan dan semakin memudahkan akses masyarakat terkait informasi di lingkungan pemerintahan (Kase, 2010).

Pemerintah terus melakukan inovasi dan berlomba-lomba dalam peningkatan pelayanan untuk masyarakat melalui cara yang lebih efektif dan modern (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020). Hal ini juga terjadi pada Kementerian Sosial yang selalu berusaha dalam meningkatkan pelayanan mereka untuk masyarakat melalui sistem yakni aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) (Aisidah, 2020).

Masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam penyelenggaraan *e-government*. Namun demikian, dalam konteks penelitian *e-government*, orientasi terhadap masyarakat masih belum banyak dieksplorasi karena sebagian besar proyek *e-government* hanya mentransformasi layanan dan informasi yang semula masih tradisional menjadi menggunakan teknologi. Model-





model penilaian kematangan *e-government* yang sudah ada pun sebagian besar hanya mengukur kemampuan teknologi *e-government* (Wulansari & Inayati, 2019).

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Indonesia diantaranya Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dilakukan program pendataan bagi masyarakat miskin bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pemuktakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini merujuk pada pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pemuktakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada Pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa pendataan adalah proses pengumpulan dan pemuktakhiran data berupa angka, teks, Gambar, audio, dan/atau dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan secara langsung.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pasal 1 ayat (3) bahwa verifikasi data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan Pasal 5 ayat (10) menyatakan bahwa mekanisme verifikasi

dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu : Penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah desa/kelurahan, kunjungan kerumah tangga miskin, pengelolaan data, pengawasan dan pemeriksaan dan pelaporan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maka pemerintah daerah termasuk pemerintah desa atau kelurahan tidak boleh lagi menghindari tanggungjawab apabila terjadi kesalahan sasaran. (Anwar Sitepu, 2019) Untuk menghindari kesalahan apabila terjadi kesalahan sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah membuat suatu program berbasis aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*) yang dapat diakses melalui *offline* atau *online*.

Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi manajemen yang dimanfaatkan bagi proses memperbaiki dan mengusulkan data baru Basis Data Terpadu (BDT) yang menyediakan beraneka layanan (Kemensos, 2019). Untuk mengakses aplikasi tersebut tidak perlu harus terkoneksi internet (Putera et al., 2017). Selain itu, penggunaan aplikasi ini hanya dimanfaatkan untuk memperbarui Optimasi SIKS-NG data *offline* sehingga fungsi sinkronisasi atau memasukkan data tidak dibutuhkan. Adanya aplikasi SIKS-NG diharapkan dapat memudahkanantisipasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat





khususnya sehubungan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Pertiwi, 2020). Aplikasi ini digunakan untuk menghasilkan data ringkasan atau *resume* seperti rekapitulasi dan data hasil perbaikan serta pengusulan data baru (Husri, 2021).

Di Kabupaten Bengkulu Selatan aplikasi SIKS-NG mulai di perkenalkan pada tahun 2019, sosialisasi dilakukan oleh setiap pendamping Kecamatan yang berasal dari Dinas Sosial. Dari setiap desa dipilih satu orang untuk menjadi operator yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ini. Operator desa bertugas untuk menginput data masyarakat yang termasuk kategori miskin dan kurang mampu. Setelah data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG kemudian data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yang berwenang memverifikasi dan validasi data tersebut. Dengan menerapkan aplikasi SIKS-NG maka bantuan sosial diharapkan tepat sasaran dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun pada kenyataannya angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup tinggi.

Berdasarkan observasi awal di Kabupaten Bengkulu Selatan diperoleh hasil adanya beberapa masalah yang terdapat pada pengolahan data kemiskinan dengan sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) yakni diamati pada evaluasi

sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) yang belum secara detail memeriksa keberadaan hasil dan dampaknya bagi penerima manfaat, hal ini disebabkan oleh setelah operator mengunggah data, pihak desa tidak melakukan pengecekan di lapangan guna melihat bagaimana kondisi nyata dari penerima manfaatnya. Berikutnya, pemberian fasilitas yang terbatas dari desa salah satunya laptop sebab ketika operator SIKS-NG menghadapi kesulitan dalam mengunggah data karena aplikasinya dirasa berat saat dijalankan, bahkan saat pengunggahan data dilakukan terus menerus oleh operator SIKS-NG akan menimbulkan *error* di aplikasi karena kurang maksimalnya fasilitas laptop yang diberikan oleh desa

Masyarakat miskin di kabupaten Bengkulu Selatan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahun 2023 masih cukup banyak dengan jumlah 31.793 kepala keluarga yang masih terdaftar sebagai keluarga miskin atau sebanyak 95,261, hal tersebut mencerminkan kurangnya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin, khususnya perihal bantuan sosial. Peneliti juga akan meneliti sejauh mana pemahaman operator desa dalam menjalankan aplikasi SIKS-NG, kesiapan sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada penerapan *e-government* melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), target sasaran





yang tepat, serta implementasi dan pelaksanaannya diharuskan sejalan dengan prosedur yang tersedia. permasalahan lainnya adalah tidak terkoordinasinya perlindungan sosial yang menyebabkan program tumpang tindih antara instansi dari pusat dan daerah (Hendra Fareza Pohan, 2021).

Hal tersebut dilaksanakan supaya kemiskinan dapat diverifikasi dengan aman. Sehingga proses menangani kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik secara otomatis. Lalu ini menjadi permasalahan tersendiri sebab penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) diharapkan bisa dimanfaatkan bagi perencanaan, pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan sosial/subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Adapun penelitian yang membahas tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022) dengan judul Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan menerapkan lima aspek layanan, seperti *one stop service*, kemitraan, program mekanisme layanan, manajemen kasus, dan informasi dan intervensi sistem. Persamaan penelitian diatas adalah kesamaan fokus penelitian yang berfokus pada efektivitas program serta persamaan lainnya adalah metode penelitiannya menggunakan metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan diatas ialah peneliti diatas membahas tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas sedangkan penelitian ini membahaskan tentang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*(SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan.

Penelitian kedua yang dilakukan Aziz, R. A., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022) berjudul Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*: Studi tentang Pelayanan Akta Kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menggunakan teori elemen sukses *E-Government* (Indrajit, 2006), yaitu: 1). Elemen *Support* yaitu adanya dukungan pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan inovasi pelayanan berbasis *E-Government* dan adanya aturan yang mendukung penerapan *E-Government*. 2). Elemen *Capacity* yang meliputi Sumber daya finansial berasal dari APBD dan CSR, tersedianya infrastruktur yang mendukung seperti adanya perangkat komputer, printer dan jaringan internet dan infrastruktur sdm yang kompeten melalui pelatihan. 3). Elemen *Value* yaitu manfaat yang diterima masyarakat adanya penerapan *E-Government* yakni kemudahan mendapatkan pelayanan tanpa perlu datang ke kantor dinas maupun kekelurahan dan proses permohonan yang cepat terselesaikan. Meskipun penelitian ini memiliki





kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam teori yang digunakan, terdapat perbedaan yang signifikan karena peneliti berfokus pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Karniawati, N., & Andiani, Y. (2023) berjudul "*Poverty reduction in Indonesia through utilization of social security fund application*" bertujuan untuk mengkaji penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan aplikasi dana jaminan sosial. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG merupakan solusi yang terintegrasi, efektif, dan efisien dalam pengelolaan data kemiskinan. Temuan ini berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam metode yang digunakan, terdapat perbedaan yang signifikan karena peneliti berfokus pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penelitian keempat yang dilakukan Purwanti, E. H. (2023) berjudul Penerapan *E-Government* Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, permasalahan yang sering dihadapi pada proses implementasinya adalah data yang terdapat di Aplikasi SIKS-NG seperti NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga mengakibatkan data tersebut tidak bersinergi, dimana data ini tidak cocok dan tidak valid dalam sistem aplikasi SIKS-NG ketika dilaksanakan pengusulan DTKS. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam metode yang digunakan, terdapat perbedaan yang signifikan karena peneliti berfokus pada Penerapan *E-Government* melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penelitian kelima yang dilakukan Gaghauna, V. G., Safar, M. M., & Wahab, A. (2022) berjudul Optimasi SIKS-Ng di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, penelitiannya bersifat deskriptif dan memakai pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya memperlihatkan belum memadainya sarana dan prasarana, keleluasaan ruang kerja serta kuantitas sumber daya manusia (SDM) sehingga perlu dilakukan optimalisasi supaya





pemanfaatan aplikasi SIKS-NG bisa berjalan dengan maksimal. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam metode yang digunakan, terdapat perbedaan yang signifikan karena peneliti berfokus pada Penerapan *E-Government* melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan dan menggunakan teori *e-goverment*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan *E-goverment* melalui aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Urgensi dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi yang bermanfaat baik untuk masyarakat dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif dipilih karena dengan metode ini, pemecahan masalah bisa dilaksanakan dengan menyelidiki secara mendalam dan menggambarkan kondisi subjek dan objek yang diteliti di lapangan dengan apa adanya. Tujuan pendekatan ini yaitu ingin memperoleh hasil yang komprehensif serta mendalam tentang Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Teknik Pengumpulan Data dilaksanakan melalui cara Observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi.

(Lexy & Moleong,, 2004) untuk teknik pengumpulan data, dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci penelitian, yaitu ;

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Fasilitator SIKS-NG Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Fasilitator SIKS-NG di tingkat Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Operator SIKS-NG Desa

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber referensi baik berupa buku, jurnal maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kajian literatur.

Teknik analisis data dalam penelitian faktor-faktor penghambat penerapan *e-goverment* melalui SIKS-NG dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian (Sugiyono, 2010). Teknik validasi data menggunakan teknik *triangulasi* data yang mana data yang diperoleh selama penelitian dilakukan baik yang berasal dari sumber primer maupun yang berasal dari sumber sekunder diproses melalui tiga tahap sebagaimana pendapat Moleong (2017)



yaitu *check*, *re-check* dan *cross-check*, sehingga data tersebut bersifat kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *e-goverment* melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) yang menjadi aplikasi pengolah data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan program dalam proses memperbaiki dan mengusulkan data basis terpadu yang didalamnya terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial kepada masyarakat sehingga terverifikasi dan tervalidasi dan berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Dalam hal ini untuk mengetahui keberhasilan dari Penerapan *e-government* pada Implementasi aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat dari tiga elemen menurut teori Indrajit (2016) :

Elemen *Support*

Dukungan yang dimaksud antara lain; dialokasikannya sumber daya manusia, finansial, tenaga, waktu, dll (Indrajit (2016). Hal terpenting yang harus dimiliki dalam menerapkan *E-government* yaitu *support* yang merupakan dukungan dalam penerapan *E-government*, baik dari pemerintah, masyarakat sekitar, dan pihak stakeholder atau swasta. Dukungan yang bisa diberikan bisa berbentuk hal-hal berikut:

- Menyepakati kerangka *E-government*

Dalam kasus penerapan SIKS-NG di Bengkulu Selatan, terdapat dukungan yang kuat dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, yang memberikan prioritas tinggi untuk program SIKS-NG ini. Mereka berupaya meningkatkan kemampuan operator di bidang IT melalui bimbingan teknis di kecamatan-kecamatan. Berikut ini beberapa contoh kecamatan yang melakukan bimbingan teknis yang di adakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan :



Galeri Bidang Fakir Miskin dalam melaksanakan BIMTEK APLIKASI SIKS-NG di kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 1. Galeri Bidang Fakir Miskin Dalam Melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi SIKS-NG di Kecamatan Kedurang ilir





Pelatihan Bimtek Siks-NG di Kecamatan Kota Manna



Gambar 2 Galeri Bidang Fakir Miskin Dalam Melaksanakan Bimtek Aplikasi SIKS-NG di Kecamatan Kota Manna



Bimtek Siks-NG di Kecamatan Kedurang



Gambar 3 Galeri Bidang Fakir Miskin Dalam Melaksanakan Bimtek Aplikasi SIKS-NG di Kecamatan Kedurang

Selain itu, dukungan dan persetujuan secara langsung dari Bupati, Gusnan Mulyadi, juga berdampak positif bagi penerapan program SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain dukungan dari pemerintah daerah, dorongan dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial juga diperlukan dalam proses implementasi aplikasi SIKS-NG

untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah tidak hanya sekedar meluncurkan suatu program inovatif namun sekaligus mendukung secara penuh para pelaksana/operator di lapangan. Dukungan diberikan oleh banyak pihak baik dari pusat atau Kabupaten, berbagai cara sudah dilakukan untuk penerapan program SIKS-NG ini seperti peningkatan pemahaman Operator pada proses penginputan data ke dalam aplikasi SIKS-NG melalui Bimbingan teknis ke Kecamatan-kecamatan. Pemerintah juga memfasilitasi teknologi untuk operatornya. Sehingga bisa disimpulkan adanya *Support* atau dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor kesuksesan program SIKS-NG ini. Kepedulian dan sumbangsih pihak dari atasan tentunya dapat menjadi sumber penyemangat dan cikal bakal kesuksesan program ini.

- **Mengalokasikan sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan sebagainya)**

Pemerintah memiliki fokus pada pemilihan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan finansial guna menunjang kesuksesan programnya. Program tersebut belum berjalan lancar jika operatornya tidak mempunyai keahlian di bagian komputer serta kurang memperhatikan pelatihan di kecamatan. Hal ini dibuktikan dari segi kualitas sumber daya manusia nya yang kurang memadai maka kevalidan datanya pun tidak meningkat. Tentu ini merupakan



salah satu faktor belum efektifnya sebuah program.

- **Pembangunan berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung guna menciptakan lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-government***

Selain dukungan penuh dari kalangan pejabat pemerintah dan sumber daya manusia yang mendukung penerapan pelayanan berbasis elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pada pasal 1 disebutkan bahwa Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang berikutnya disingkat SIKS-NG merupakan sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial.

Undang-Undang tersebut berhubungan dengan informasi pengolahan data yang diperoleh dari masyarakat yang selanjutnya dikelola pada sebuah aplikasi ataupun program yang dikenal dengan SIKS-NG. Dalam pengolahan data tersebut seluruh operator menggunakan perangkat keras atau lunak seperti komputer, kamera, printer, scanner, serta jaringan internet. Sehingga Undang-Undang tersebut

berhubungan dengan pengadaan komputer dan sebagainya.

- **Adanya sosialisasi konsep *E-government* secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh**

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya (Budiani, 2007:53). Pihak Pemerintah telah melakukan sosialisasi pada tahun 2019 yang menjadi awal penerapan program SIKS-NG dengan melakukan sosialisasi dari Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.

Strategi sosialisasi pemerintah mengenai program SIKS-NG bisa diketahui bahwa salah satu faktor kesuksesan program SIKS-NG adalah ketekunan dari pemerintah dalam mensosialisasikan sebuah program yang akan digunakan dalam mempermudah pendataan masyarakat sehingga masyarakat juga memahami pentingnya pendataan tersebut dilakukan.

Sebuah program akan sulit berkembang dan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Mereka juga memanfaatkan sosial media untuk mensosialisasikan program SIKS-NG ini





kepada masyarakat supaya lebih banyak orang yang mengetahuinya.

Support ataupun dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai pengembangan penerapan *E-government* pada program SIKS-NG telah dianggap cukup baik, karena mendapat banyak dukungan melalui pemberian pelatihan-pelatihan dari Kabupaten hingga ke Kecamatan, tetapi keuangan dan fasilitas belum memadai yang menjadi faktor penghambat kinerja Operator sehingga program menjadi kurang efektif.

Elemen *capacity*

Faktor *Capacity* menurut (Indrajit, 2016) merupakan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan dan pembangunan konsep *E-government* supaya bisa terwujud. Sehubungan dengan upaya pengembangan *E-government* di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diwujudkan dengan tiga hal minimal yang setidaknya harus dimiliki pemerintah terkait Faktor kesuksesannya antara lain:

- **Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government*.**

Pendanaan untuk mengembangkan *E-government* di Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri telah mempunyai anggaran untuk seluruh kegiatannya tak terkecuali untuk anggaran melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi semua operator di

Kabupaten Bengkulu Selatan. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan SIKS-NG bersumber dari APBN kementerian sosial. Sementara itu sesudah adanya evaluasi pengadaan barang berupa laptop untuk operator, maka diperlukan anggaran untuk mengembangkan program SIKS-NG ini baik itu untuk internet atau hal lainnya dengan memakai APBD masing-masing desa supaya program ini dapat terus berkembang serta semakin sukses.

- **Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.**

Sehubungan dengan program SIKS-NG yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi belum memadai dalam mendukung penerapan *E-government* di masing-masing kabupaten/desa.

Salah satu contohnya adalah keterbatasan infrastruktur pengadaan laptop. Dinas sosial hanya memberikan laptop berkapasitas kecil kepada para operator, yang menjadi penghambat dalam proses pendataan. Kendala ini menyulitkan setiap operator dalam menjalankan tugasnya. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, seperti pengadaan laptop dengan kapasitas yang memadai, perlu dilakukan guna mendukung kelancaran implementasi *E-government* di Kabupaten Bengkulu Selatan.





- **Ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan keahlian**

Saydam (2011) menyebutkan bahwa pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan program SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah SDM yang mempunyai kompetensi atau skill di bidang *Information technology* (IT). Tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa operator desa yang dipilih kurang mempunyai bekal pengetahuan mengenai komputer, aplikasi dan pengoperasiannya sehingga Operator mengalami kendala dalam proses pengimputan data apabila tingkat pendidikannya tidak dipermasalahkan oleh pihak dinas harus pendidikan tingkat S1 yang penting memahami, berkeinginan terus belajar serta rajin mengikuti pelatihan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi pelatihan untuk para operator supaya mereka berkembang cepat.

Capacity, Ketersediaan sumber daya pada implementasi *e-goverment* melalui sistem informasi kesejahteraan sosial generasi selanjutnya (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu

Selatan baik sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangannya dinilai kurang baik. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah operator kurang skill dalam menggunakan komputer sehingga Operator menghadapi permasalahan ketika menginput data. Sedangkan mengenai sumber daya finansial atau anggaran yang disediakan telah memadai dimana sumber anggaran tersebut adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial melalui Kantor dinas sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

Elemen *value*

Manfaat yang diberikan tidak hanya pada kalangan pemerintah itu sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (Indrajit (2016). *E-government*, atau pemerintahan elektronik, adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan transparan kepada masyarakat. *E-government* memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam konteks aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan, manfaat dari program ini sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Namun, masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu yang belum merasakan manfaat dari aplikasi tersebut. Banyak masyarakat



yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa program ini belum berhasil sepenuhnya dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan dan angka kemiskinan tetap tinggi.

Pada sisi pemerintah sebagai pemberi layanan, *e-government* memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, *e-government* dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan data. Dengan adanya aplikasi SIKS-NG, proses pendataan dan pengolahan informasi mengenai masyarakat penerima bantuan dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan waktu yang lebih lama. Data yang terintegrasi dan terpusat memungkinkan pemerintah untuk melakukan analisis yang lebih baik terkait penyaluran bantuan dan perencanaan program sosial.

Kedua, *e-government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya aplikasi SIKS-NG, masyarakat dapat mengakses informasi secara *online* mengenai program bantuan sosial yang tersedia dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini membantu mengurangi praktik korupsi dan nepotisme dalam penyaluran bantuan. Ketiga, *e-government* memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap program bantuan sosial. Dengan adanya data yang tercatat

dalam aplikasi SIKS-NG, pemerintah dapat melacak proses penyaluran bantuan dan memonitor penggunaannya. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan dalam proses dan kebijakan yang diterapkan.

Namun, meskipun terdapat manfaat yang sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat dalam program SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan, masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan banyak masyarakat kurang mampu belum merasakan manfaat dari aplikasi tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pendataan yang akurat dan lengkap. Proses pendataan yang tidak memadai menyebabkan beberapa masyarakat tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga mereka kehilangan akses terhadap bantuan sosial yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam proses penyaluran bantuan. Dalam konteks program SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum merasakan manfaat dari aplikasi tersebut. Beberapa kendala yang dapat menjadi penyebabnya antara lain :

- **Keterbatasan akses dan keterampilan teknologi:**

Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi seperti *smartphone* atau komputer. Hal ini menjadi hambatan dalam mengakses informasi dan mengikuti proses pendaftaran atau penyaluran bantuan melalui aplikasi SIKS-NG.



- **Ketidaktahuan tentang program dan prosedur:**

Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami tentang program bantuan sosial yang tersedia atau tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dapat menyebabkan mereka tidak memanfaatkan aplikasi SIKS-NG dengan optimal.

- **Kurangnya pendataan yang akurat dan lengkap:**

Proses pendataan yang tidak memadai dapat menyebabkan beberapa masyarakat kurang mampu tidak terdaftar dalam basis data DTKS. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap bantuan sosial yang seharusnya mereka terima.

- **Masalah teknis dalam aplikasi :** Kemungkinan adanya bug atau masalah teknis dalam aplikasi SIKS-NG dapat menghambat proses pendaftaran atau penyaluran bantuan. Ketidakmampuan pemerintah dalam memelihara dan memperbaiki aplikasi dengan cepat dapat menghambat efektivitas program.

Perubahan kenaikan terhadap data DTKS di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022/2023 mencapai 95.261 jiwa

atau sebanyak 31.793 Kartu Keluarga yang terdata dari total 168.936 jiwa penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan. Dibawah ini adalah data jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2023 :

Tabel 1 Data Jumlah Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2023

Angka Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan (Persen)			
2020	2021	2022	2023
17,82	18,16	17,86	17,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu selatan, 2023

Dari data BPS di atas, dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020 mencapai 17,82%, kemudian naik menjadi 18,16% pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 18,16%. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 17,86%. Di tahun 2023, angka kemiskinan tetap bertahan pada tingkat yang sama, yaitu 17,86%. Menariknya, sejak tahun 2022 hingga saat ini, angka kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan belum efektif dalam menyaring atau menyeleksi penerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran dan angka kemiskinan tetap tinggi. Terjadinya kenaikan jumlah KPM disebabkan oleh





cukup banyaknya KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial tetapi masih terdata dalam DTKS. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dan operator Aplikasi SIKS-NG Kecamatan tidak melaksanakan pencocokan DTKS dengan data di lapangan. Berikut ini adalah data kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022 :

Tabel 2 Data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

Wilayah	Kemiskinan Kabupaten/Kota Maret (Persen)		
	2020	2021	2022
Provinsi Bengkulu	15,03	15,22	14,62
Bengkulu Selatan	17,82	18,16	17,86
Rejang Lebong	15,85	15,85	15,65
Bengkulu Utara	11,67	11,61	11,48
Kaur	18,47	18,62	18,10
Seluma	18,56	18,72	18,36
Mukomuko	11,72	11,93	11,44
Lebong	11,85	12,00	12,03
Kepahiang	14,69	14,83	14,53
Bengkulu Tengah	9,30	9,68	9,76
Kota Bengkulu	17,65	17,89	15,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2023

Dilihat dari tabel diatas, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kabupaten

yang memiliki tingkat kemiskinan nomor tiga tertinggi di antara semua kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Meskipun Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerapkan aplikasi SIKS-NG untuk pendataan kemiskinan dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, meskipun upaya besar telah dilakukan, angka kemiskinan di wilayah tersebut belum mengalami perubahan yang stabil, dan belum berhasil secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan *e-government* melalui aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Salah satu elemen tersebut adalah dukungan dari pejabat publik, termasuk Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bupati, yang memberikan prioritas tinggi pada program ini. Dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi aplikasi ini. Dorongan dan inisiatif dari pemerintah sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi dan pengembangan *e-government*. Selain dukungan, kapasitas sumber daya juga menjadi elemen yang perlu diperhatikan.

Dalam penerapan SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat kendala terkait kapasitas seperti kurangnya fasilitas laptop yang memadai dan kekurangan pengetahuan teknologi di





kalangan staf. Peningkatan kapasitas dalam infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi penting agar konsep *e-government* dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.

Manfaat yang diberikan oleh *e-government* kepada pemerintah dan masyarakat juga harus dinilai. Dalam konteks aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan, manfaat program ini sudah dirasakan oleh masyarakat yang terdata dalam DTKS. Namun, masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa program ini belum berhasil sepenuhnya dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan. Evaluasi terhadap manfaat yang diberikan kepada masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program ini dalam mengurangi angka kemiskinan.

Dalam penerapan SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan, aplikasi ini termasuk dalam jenis *Publish*, di mana hanya petugas yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Model *e-government* yang digunakan adalah G2G vertical dan horizontal. Dalam model ini, terdapat pertanggungjawaban dan sinergi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pemutakhiran data DTKS, memastikan koordinasi yang efektif dan integrasi data yang akurat. Meskipun SIKS-NG telah mengalami peningkatan jumlah data DTKS, terdapat kendala dalam melakukan

penyaringan dan penyeleksian penerima bantuan sosial. Masalah seperti NIK ganda dan ketidakcocokan data dengan situasi di lapangan berdampak pada pencairan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Untuk meningkatkan efektivitas aplikasi SIKS-NG, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dan operator aplikasi SIKS-NG di kecamatan perlu melakukan pencocokan data DTKS dengan data di lapangan secara lebih teliti. Proses validasi dan verifikasi data perlu ditingkatkan untuk memastikan keakuratan informasi yang terdapat dalam aplikasi. Peningkatan kapasitas staf terkait penggunaan aplikasi dan teknologi informasi juga perlu dilakukan agar pemutakhiran data DTKS dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Secara keseluruhan, penerapan *e-government* melalui aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan langkah yang positif dalam upaya mengelola data kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dukungan, kapasitas, dan manfaat merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan dalam proses implementasi. Melalui evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.





Saran

1. Pemerintah desa yang merupakan pelaksana program SIKS-NG diharapkan lebih meningkatkan atensi dan perhatian pada penyelenggaraan program tersebut sehingga bisa diimplementasikan lebih efektif dan optimal. Perhatian lebih dibutuhkan pada sisi sarana dan prasana sebab pendataan ini sangat penting sehubungan dengan bantuan pemerintah yang diberikan tepat sasaran.
2. Pemerintah desa diharapkan lebih mampu memfokuskan pada penanganan pendataan dan penyaluran bantuan sosial, sehingga data yang dihasilkan bisa dijadikan kunci kesuksesan dan keberhasilan program SIKS-NG yang mengatasi permasalahan data guna memberikan hasil data yang valid atau data yang tepat sasaran.
3. Sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan perlu ditingkatkan lagi supaya kegunaan dan manfaat dari program SIKS-NG ini bisa diketahui dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aisidah, S. (2020). Pendampingan Aplikasi Rapor Digital di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jinan Wonoayu

Sidoarjo. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10(2), 254-279.

Aziz, R. A., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi tentang Pelayanan Akta Kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya. *Journal of Office Administration: Education and Practice*, 2(3), 211-220.

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "eka taruna bhakti" desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.

Fathony, R., Muradi, M., & Sagita, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(2), 1-12.

Gaghauna, V. G., Safar, M. M., & Wahab, A. (2022). Optimasi SIKS-Ng di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1286-1293.

Hendra Fareza Pohan, H. F. (2021). Analisis Usability Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Menggunakan Metode McCall pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat. *Usability Analysis of Social Welfare Information System Next Generation Using McCall Method in Langkat District Social Service*, 6(8), 1116-1121.

Habibullah, A., & Ferawati, D. (2022). Government To Employes : PENERAPAN Aplikasi Sistem





- Informasi Layanan Online Kepegawaian (SINOK) Dalam Mengukur Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 10(2), 120-135.
- Husri, H., Usman, D., & Mone, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(6), 1923-1935.
- Karniawati, N., & Andiani, Y. (2023). Poverty reduction in Indonesia through utilization of social security fund application. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 10(1), 65-73.
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). Smart City Kota Magelang: Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 356-367.
- Kusnan, K., Asmorowati, S., & Setijaningrum, E. (2021). Open Government in Grassroot Level Government (Study of Website Quality in Pejambon Village, Bojonegoro). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(1), 82-99.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32- 42.
- Sitepu, A., & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 184-199.
- Purwanti, E. H. (2023). Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 91-103.
- Pertiwi, M. T. (2020). Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sudimara Jaya (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Putera, J. M., Irwansyah, M. A., & Sukamto, A. S. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Android Dengan Penerapan Web Service Pada Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, 5(1), 47-51.
- Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1294-1305.
- Wulansari, A., & Inayati, I. (2019). Faktor-faktor kematangan implementasi e-government yang berorientasi





kepada masyarakat. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 5(1), 24-36.

Buku

- Hammer, M., dan J. Champy. (1993). *Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution*. HarperCollins. New York.
- Moleong, Lexy J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wheelen & Hunger. (2004). *Strategic Management And Business Policy*, Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Peraturan-Peraturan

- Bappenas. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial No.146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
- Undang- undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1 tentang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Internet

- Kementrian Sosial Republik Indonesia (2023). Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation “SIKS-NG,” Kementrian Sosial Republik Indonesi. Retrieved from <https://kemensos.go.id/siks-ng>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, (2023). Retrieved from <https://bengkulu.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statisti Kabupaten Bengkulu Selatan (2023). Retrieved from <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/>

PROFIL SINGKAT

Penulis merupakan mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Pendidikan sarjana di tempuh di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia tahun 2017 dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2021.

